BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Pembentukan Provinsi Jawa Barat

Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (Staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Selama lebih kurang 50 Tahun sejak pembentukannya, wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian. Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan tediri dari : 20 kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya. Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kota Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom.

Lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon. Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 17 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 615 Kecamatan, Desa.Kelurahan 5,853.

3.1.1 Letak Geografis Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50 - 7°50 LS dan 104°48 - 104°48 BT dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat dan Banten serta DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, antara Samudra Indonesia di Selatan dan Selat Sunda di barat. Dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 Pulau di Samudera Indonesia, 4 Pulau di Laut Jawa, 14 Pulau di Teluk Banten dan 20 Pulau di Selat Sunda), luas wilayah Jawa Barat 44.354,61 Km2 atau 4.435.461 Ha. Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan.

Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah. Dengan ditetapkannya Wilayah Banten menjadi Provinsi Banten, maka luas wilayah Jawa Barat saat ini menjadi 34.816,96.

3.1.2 Tofografi dan Iklim Provinsi Jawa Barat

Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100 1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian 0 . 10 m dpl, dan wilayah aliran sungai. Iklim di Jawa Barat adalah tropis, dengan suhu 9 0 C di Puncak Gunung Pangrango dan 34 0 C di Pantai Utara, curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun.

3.2 Keadaan Umum KPU Provinsi Jawa Barat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat adalah salah satu lembaga pemerintah yang berkedudukan di Provinsi Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi Jawa Barat di bantu oleh lembaga kesekretariatan KPU. Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam pemyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Barat, dan lembaga kesekretariatan ini secara oprasional akan bertanggungjawab sepenuhnya kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi

2. Pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi
3. Pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan
4. Perumusan dan penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum
5. Pemberian dan pelayanan informasi Pemilu, partisipasi masyarakat, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan Pemilu di Provinsi.
6. Pengelolaan data Pemilu di Provinsi
7. Pengelolaan logistik dan distribusi atau jasa keperluan Pemilu
8. Pelaksanaan kerja sama antar lembaga
9. Penyusunan laporan penyelengaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi Jawa Barat

KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum bebas dari tekanan kepentingan-kepentingan serta kuatnya tuntutan dari banyak pihak bahwa lembaga penyelenggara harus bersih dari intervensi partai politik dan pemerintah, maka DPR bersama pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota KPU Provinsi Jawa Barat terdiri dari orang-orang independen dan non partisipan.

Sifat independen dan nonpartisipan KPU Provinsi Jawa Barat saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Dari semua calon anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang diajukan Gubernur kepada KPU untuk mendapat persetujuan, tidak satupun yang berasal dari partai politik. Pada

umumnya para calon berasal dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemilu Provinsi Jawa Barat diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana Pemilu diprovinsi yang merupakan bagian dai KPU. Yang mempunyai anggota 5 (lima) orang. Sedangkan keanggotaan KPU Provinsi Jawa Barat terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu seoarang wakil ketua, merangkap aggota, dan para anggota.

Setiap anggota memiliki suara yang sama. Dalam menjalankan tugasnya KPU Provinsi mempunyai sekretariat yang berlokasi Jl. Garut No 11 Bandung. Pola keorganisasian dan tata kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diusulkan oleh KPU yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dalam menjalankan tugasnya KPU Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan KPU secara periodik.

3.2.1 Tugas Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat

Sebagaimana pola keorganisasian dan tata kerja KPU Provinsi Jawa Barat sekretariat Provinsi dalam menyelenggarakan pemilihan umum, maka Tugas Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
2. Memberikan dukungan teknis administratif
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.2.2 Wewenang Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat

Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU dan
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undanga.

3.2.3 Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat

Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

(1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan

(2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu dan

(3) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.2.4 Visi dan Misi KPU Provinsi Jawa Barat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat memiliki visi sebagai berikut : Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam wadah Negara Kesatuan Repiblik Indonesia.

Sedangkan misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat sebagai Berikut :

1. Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum
2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewanperwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, presiden danwakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secaralangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara,serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis

3.2.5 Tujuan Dan Sasaran KPU Provinsi Jawa Barat.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari Visi dan Misi yang telah ditentukan, komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode tahun 2005-2008 adalah sebagai berikut :

1. Adapun tujuan yang dihapkan KPU Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur adalah untuk memiliki kesadaraan yang tinggi tentang kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur. Peserta kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan undang-undang, mendapat perlakuan yang adil dan setara. Keorganisasian penyelenggara kampanye memiliki sistem administrasi yang transparan, edfisien, dan memenuhi standar kerja professional di seluruh tingkatan.

2. Sedangkan sasaran yang dihapakan KPU Provinsi Jawa Barat adalah agar rakyat dapat memiliki kesadaran yang tinggi tentang kampanye yang lebih baik, dan efektif. Dengan dijamin tujuan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara bagi peserta kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta pejabat-pejabat publik lain sesuai undang-undang. Organisasi pelaksana penyelenggara kampanye memiliki sistem administrasi yang tranparan, efisien dan memenuhi standar kerja professional di seluruh tingkatan. Dan juga dapat mendiskripsikan tugas setiap personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selesai dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah keputusan tentang struktur organisasi Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

3.3 Rencana Strategis KPU Provinsi Jawa Barat.

3.3.1 Kebijakan Srategis KPU Provinsi Jawa Barat

Adapun rencana srategis KPU Provinsi Jawa Barat terdiri kebijakan srategis sebagai berikut:

1. Menjabarkan secara teknis peraturan perundang-undangan pemilu dalam bentuk keputusan-keputusan
2. Menentukan kebijakan penyediaan anggaran, pengadaan barang dan jasa serta pendistribusianya, serta perhubungan dan telekomunikasi untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu di tingkat pusat dan daerah

3. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi pemilihan umum
4. Mendorong kemampuan dan kemadirian masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum
5. Mendorong keterpaduan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum
6. Mendorong terciptanya kreadibilitas personil (SDM) organisasi penyelenggara pemilu sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dan parpol peserta pemilu
7. Mengadakan kajian dan pengembangan sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum secara berkesinambungan

3.3.2 Program Srategis KPU Provinsi Jawa Barat

Adapun rencana srategis KPU Provinsi Jawa Barat terdiri kebijakan program strategis sebagai berikut

1. Program penjabaran secara teknis peraturan perundang-undangan tentang pemilu
2. Program pengembangan sistem data pemilih
3. Program pengembangan pendidikan pemilih
4. Program kajian dan pengembangan sistem dan penyelenggaraan pemilu
5. Program teknis penyelenggaraan pemilu
6. Program pengadaan barang dan jasa pendukung pemilu
7. Program penyusunan sistem dan pola angkutan, perhubungan dan telekomunikasi serta pendistribusian barang/jasa kebutuhan pemilu

8. Program penyusunan pembiyayaan dan anggaran pemilu
9. program pengembangan pelayanan sistem informasi dan tekhnologi informasi pemilu
10. Program pengembangan kapasitas struktur organisasi dan personil badan penyelenggara pemilu
11. Program peningkatan kerjasama hubungan antar leemabaga
12. Program pengisian keanggotaan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilu 1999
13. Program monitoring dan evaluasi serta pengawasan pemilu

3.4 Jumlah Pegawai KPU Provinsi Jawa Barat

KPU Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah aparatur sebanyak 128 orang, adapun susunan berdasarkan tingkat golongan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai KPU Provinsi Jawa Barat

PERSONIL		PENDIDIKAN		PANGKAT	
KPU	5	S2	6	IV/e	0
PNS	40	S1	18	IV/d	0
TKK	19	D3	5	IV/c	1
JUMLAH	64	D1	1	IV/b	0
		SLTA	27	IV/a	3
		SLTP	2	III/d	6
		SD	5	III/c	5
		JUMLAH	64	III/b	13
				III/a	7
				II/d	1
				II/c	2
				II/b	0
				II/a	2
				I/d	0

I/c	0
I/b	0
I/a	0
JUMLAH	40

(Sumber: Sub Humas KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat sebagian besar personil aparatur KPU Provinsi Jawa Barat 5 orang personil, PNS 40 orang, dan TKK 19 orang. Sedangkan jenjang pendidikan S2 yaitu 5 orang, SI yaitu 18 orang, D3 yaitu 5 orang, D1 yaitu 1 orang, SLTA yaiyu 27 orang, SLTP yaitu 2 orang, SD yaitu 1 orang, diikuti aparatur dengan pangkat III yaitu 31 orang, dan aparatur yang memiliki pangkat II yaitu 5 orang.

3.5 Susunan Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi dalam suatu lembaga atau instansi sangat diperlukan keberadaannya. Karena struktur organisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam pembagian tugas, oleh setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing agar lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah disusun sebelumnya. Jika pembagian tugas tidak jelas, maka akan menghambat dalam pengambilan keputusan dan dalam pencapaian tujuan yang sudah direncanakan.

Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
3. Bagian Teknis dan Program Penyelenggara Pemilu, membawahkan:
    1) Sub bagian Teknis

2) Sub bagian Program.

2. Bagian Umum, membawahkan:

1) Sub bagian Keuangan

2) Sub bagian Rumah Tangga

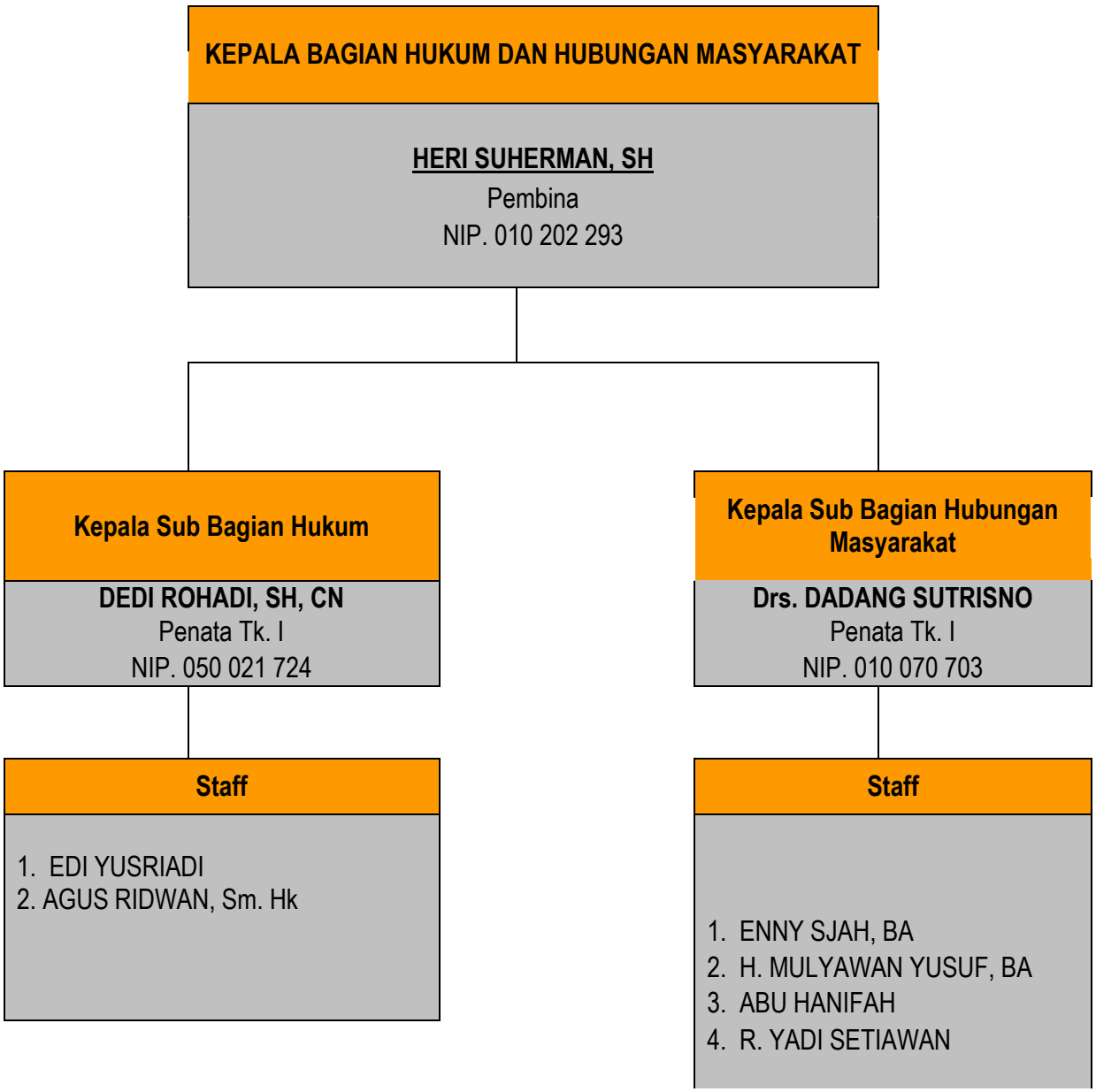
3. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Membawahkan:

1) Sub bagian Hukum

2) Sub bagian Hubungan Masyarakat

3.5.1 Susunan Struktur Organisasi Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat.

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Sub Bagian Humas KPU Provinsi



(Sumber: Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008)

Berdasarkan tabel diatas Bagian Hukum dan Bagian Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, dan penyelesaian sengketa hukum, kerja sama antar lembaga, pengawasan pelaksanaan rencana dan program, pelayanan informasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :

1. Sub bagian Hukum mempunyai tugas
    1) menyiapkan inventarisasi
    2) pengkajian
    3) penyuluhan
    4) bantua.
    5) Kerja sama antar lembaga, dan
    6) penyelesaian sengketa hukum serta pengawasan pelaksana dan program.
2. Sub bagian Hubungan Masyarakat mempuyai tugas:
    1) menyiapkan bahan informasi
    2) sosialisasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat

3.5.2 Forum Kehumasan

Forum Kehumasan Sosialisasi tatap muka melalui kegiatan Forum Kehumasan dilaksankan agar semua elemen kehumasan dapat membantu menyebarluaskan informasi pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Barat. Forum Kehumasan dilaksanakan 3 kali kegiatan dengan melibatkan Humas KPU Kabupaten/Kota, Humas Pemda Kabupaten/Kota serta wartawan media cetak baik nasional maupun daerah. Yang dilaksanakan pada tanggal 10,13 dan 23 Maret 2008 dengan peserta ± 300 orang dengan Narasumber dari Pakar Perguruan Tinggi dan Tokoh Pers Jawa Barat Launching Jadwal dan Calon serta Deklarasi dan Pawai Damai.

3.6 Program Penjabaran Peraturan Perundang- undangan Tentang Pemilu.

Adapun program penjabaran teknis peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008
2. Tata cara pencalonan pemilihan gubernur dan Wakil gubernur jawa barat tahun 2008
3. Tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat tahun 2008
4. Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Tahun 2008
5. Penetapan Jadwal Kampanye dan Daerah Kampanye
6. Persiapan pemilihan umum gubernur dan Wakil gubernur jawa barat tahun 2008
7. Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur jawa barat tahun 2008

8. Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara
9. Dasar hukum penetapan tahapan pemilu gubernur dan wakil gubernur
10. Pemantauan pemilu gubernur dan wakil gubernur jawa barat
11. Sosialisasi dan pendidikan pemilih
12. Implementasi sosialisasi
13. Logistik Pilkada
14. Pemungutan Suara
15. Penghitungan Suara
16. Rekapitulasi Penghitungan Suara
17. Sistem informasi pemilu
18. Pembentukan media center
19. Tugas dan peran media center
20. Strategi media center dalam menginformasikan tahapan pemilu
21. Penetapan Pasangan Calon Terpilih
22. Pemilihan Putaran Kedua
23. Kasus-kasus Hukum dalam Pilkada
24. Sengketa tentang hasil Pilkada
25. Tindak Pidana dalam Pilkada

3.7 Data Penduduk dan Potensi Pilkada Provinsi Jawa Barat

Sampai dengan akhir Tahun 2008 Data penduduk dan potensi pemilu Gubernur Jawa Barat tercatat jumlah data penduduk sebanyak 39.831.450 jiwa,

dan Data penduduk Potensi Pilkada sebanyak 29.474.152 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Data Penduduk dan Potensi Pilkada

DATA PENDUDUK DAN DAFTAR PENDUDUK POTENSI PEMILIH PILKADA (DP-4)
PROVINSI JAWA BARAT

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK			DP 4			JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	KET
			L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KAB. BOGOR	1,024,940	2,178,836	2,059,133	4,237,969	1,377,736	1,312,656	2,690,392	40	428	
2	KAB. SUKABUMI	579,815	1,162,559	1,127,907	2,290,466	793,946	765,583	1,559,529	47	352	
3	KAB. CIANJUR	577,046	1,079,156	1,049,715	2,128,871	819,659	741,621	1,561,280	30	348	
4	KAB. BEKASI	-	926,745	917,401	1,844,146	716,339	743,030	1,459,369	23	187	
5	KAB. KARAWANG	573,054	994,718	954,320	1,949,038	741,825	719,141	1,460,966	30	309	
6	KAB. PURWAKARTA	222,567	417,139	409,856	826,995	307,399	308,992	616,391	17	192	
7	KAB. SUBANG	402,291	738,981	720,616	1,459,597	543,913	482,143	1,026,056	30	253	
8	KAB.BANDUNG	729,871	1,411,414	1,383,083	2,794,497	1,131,405	1,094,671	2,226,076	30	275	
9	KAB.BANDUNG BARAT	394,271	684,814	672,380	1,357,194	590,183	566,923	1,157,106	15	165	
10	KAB. SUMEDANG	307,507	517,680	512,097	1,029,777	390,947	392,467	783,414	26	277	
11	KAB. GARUT	-	1,090,731	1,053,547	2,144,278	779,861	762,831	1,542,692	42	424	
12	KAB. TASIKMALAYA	556,564	890,299	859,719	1,750,018	651,999	630,807	1,282,806	39	351	
13	KAB. CIAMIS	479,368	724,189	737,759	1,461,948	-	-	1,042,962	36	347	
14	KAB. CIREBON	603,337	1,037,830	1,036,248	2,074,078	790,756	768,796	1,559,552	40	424	
15	KAB. KUNINGAN	260,290	558,068	545,135	1,103,203	423,059	408,801	831,860	32	376	
16	KAB. INDRAMAYU	514,418	852,471	852,080	1,704,551	622,775	622,838	1,245,613	31	313	
17	KAB. MAJALENGKA	371,153	598,354	604,944	1,203,298	-	-	901,489	26	331	
18	KOTA BANDUNG	889,382	1,485,723	1,376,056	2,861,779	-	-	2,341,804	30	151	
19	KOTA BOGOR	248,027	486,623	468,204	954,827	363,362	355,451	718,813	6	68	
20	KOTA SUKABUMI	64,317	130,879	132,767	263,646	109,419	107,950	217,369	7	33	
21	KOTA CIREBON	70,030	141,170	139,600	280,770	99,022	101,147	200,169	5	22	
22	KOTA BEKASI	425,989	803,252	881,737	1,684,989	600,986	597,674	1,198,660	12	56	
23	KOTA DEPOK	332,318	-	-	1,189,528	-	-	935,029	6	63	
24	KOTA TASIKMALAYA	156,056	279,109	274,454	553,563	-	-	412,700	8	69	
25	KOTA CIMAHI	135,696	257,941	254,345	512,286	180,093	184,589	364,682	3	15	
26	KOTA BANJAR	48,633	84,888	85,250	170,138	68,508	68,865	137,373	4	24	
	JUMLAH	9,966,940	19,533,569	19,108,353	39,831,450	12,103,192	11,736,976	29,474,152	615	5,853	

(Sumber:Sub Bag Humas KPU Provinsi Jawa Barat)

3.7.1 Data Jumlah Pemilih Gubernur Jawa Barat

Dibawah ini adalah tabel jumlah pemilih serta penyelenggara pemilu pada suatu daerah, jumlah pemilih dan penyelenggara kegiatan pemilihan umum Gubernur Jawa Barat, dari masing-masing Kabupaten/Kota Jawa Barat, dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Data Kabupaten/Kota Pemilih Gubernur

NO	KABUPATEN/KOTA	PEMILIH	PENYELENGGARA PEMILU		
			PPS	PPK	TPS
1.	KOTA BANDUNG	1.585.684	30	151	3.835
2.	KOTA CIMAHI	356.872	3	15	686
3.	KOTA DEPOK	957.732	6	63	2.09
4.	KOTA BOGOR	591.751	6	68	1.553
5.	KOTA BEKASI	1.212.083	12	56	2.903
6.	KOTA SUKABUMI	208.802	7	33	424
7.	KOTA CIREBON	157.386	5	22	470
8.	KOTA TASIKMALAYA	417.539	8	69	972
9.	KOTA BANJAR	124.321	4	24	261
10.	KABUPATEN BANDUNG	2.038.734	30	275	4.223
11.	KABUPATEN BOGOR	2.752.898	40	428	6.75
12.	KABUPATEN BEKASI	1.468	23	187	2.908
13.	KABUPATEN SUKABUMI	1.538.177	47	359	3.401
14.	KABUPATEN CIREBON	1.507.880	40	424	3.266
15.	KABUPATEN TASIKMALAYA	1.169.330	39	351	2.488
16.	KABUPATEN KERAWANANG	1.380.780	30	309	2.883
17.	KABUPATEN PURWAKARTA	573.037	17	192	1.244
18.	KABUPATEN SUBANG	1.053.833	22	253	2.348
19.	KABUPATEN INDRAMAYU	1.245.603	31	313	2.415
20.	KABUPATEN KUNINGAN	791.170	32	376	1.714
21.	KABUPATEN MAJALENGKA	880.385	26	331	2.113
22.	KABUPATEN SUMEDANG	770.750	26	277	1.858
23.	KABUPATEN CIANJR	1.468.859	30	348	3.440
24.	KABUPATEN GARUT	1.537.547	42	424	3.891
25.	KABUPATEN CIAMIS	1.134.731	36	349	2.588
26.	KABUPATEN BANDUNG BARAT	1.008.874	15	162	2.181
	J U M L A H	27.972.924	607	5.862	63.005

(Sumber: Sub Bag Humas KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008)

Tabel 3.4
Data Pemilih Gubernur Jawa Barat

No	URAIAN	JML	%
1.	Jumlah pemilih terdaftar berdasarkan salinan daftar pemilih tetap (DPT)	27.933.259	
2.	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT	18.685.282	66,89
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT	9.247.977	33,11
4.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berasal dari TPS lain	117.383	0.42
5.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih seluruhnya (angka 2 + angka 4)	18.802.665	67,31

(Sumber: Sub Bag Humas KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008)

Berdasarkan tabel di atas menerangkan bahwa data jumlah pemilih terdaftar berdasarkan salinan daftar pemilih tetap (DPT), Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT sebesar 66,89 persen pemilih, Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT sebesar 33,11 pesen pemilih, Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berasal dari TPS lain 0,42 persen pemilih, Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih seluruhnya (Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT ditambah Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berasal dari TPS lain) 67,31 persen pemilih.

Tabel 3.5
Surat Suara Pemilihan Gubernur Jawa Barat

No	URAIAN	JML	%
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS	36.076	0,13
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS	9.771.459	34,15
3.	Jumlah Surat Suara terpakai dari seluruh TPS	18.802.665	65,72
4.	Jumlah suarat suara yang diterima dari seluruh TPS dalam Wilayah KPU Provinsi Jawa Barat (jumlah 1 +2 +3)	28.610.200	100

(Sumber:Sub Bag Humas KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008)

Berdasarkan tabel di atas Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS,0,13 persen surat suara, Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS 34,15 persen surat suara, Jumlah Surat Suara terpakai dari seluruh TPS 65,72 persen suarat suara, Jumlah suarat suara yang diterima dari seluruh TPS dalam Wilayah KPU Provinsi Jawa Barat 100 persen surat suara.

3.7.2 Surat Suara Sah Pemilihan Gubernur Jawa Barat

Dibawah ini adalah tabel surat suara sah pemilihan Gubernur Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 3.6
Surat Suara Sah Pemilihan Gubernur Jawa Barat

NO	URAIAN	JML	%
1.	H.Dany Setiawan dan Myjen TNI (Purn) Iwan R Sulandjana,	4.490.901	24.95
2.	Jendral TNI (Purn) H.AgumGumelar	6.217.557	34.55

	dan H. Nu`manAbdulhakim		
3.	H. Ahmad Heryawan dan H. DedeYusuf	7.287.647	40.50
	Jumlah Surat Suara Sah	17.996.105	100

(Sumber:Sub Bag Humas KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008)

Menurut menjelaskan bahwa pasangan No urut pertama adalah pasangan H.Dany Setiawan dan Myjen TNI (Purn) Iwan R Sulandjana, perolehan suara sah sebesar dua puluh empat koma sembilan lima persen, pasangan no urut kedua adalah pasangan Jendral TNI (Purn) H.Agum Gumelar dan H. Nu`manAbdulhakim perolehan suara sah sebesar tiga puluh empat koma lima lima persen, sedangkan pasangan no urut ketiga adalah pasangan H. Ahmad Heryawan dan H. DedeYusuf dengan perolehan suara sebesar empat puluh koma lima puluh persen.

Tabel 3.7
Suara Tidak Sah Pemilihan Gubernur Jawa Barat

NO	URAIAN	JML	%
1.	Jumlah Suara Tidak Sah	806.560	4,29

(Sumber:Sub Bag Humas KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008)

Menurut tabel diatas bahwa Partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya enam puluh tujuh koma tiga puluh satu persen, walupun angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur daerah lain. Pemilih yang tidak melaksanakan haknya sejumlah tiga puluh tiga koma sebelas persen. Dan jumlah suara tidak sah prosentasenya empat koma dua puluh sembilan persen.

3.8 Sistem Oprasi *Server* Sistem Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Aplikasi sistem penghitungan suara komisi pemilihan umum telah dilengkapi dengan fasilitas import data dari *excel* yang bertujuan untuk memudahkan pengelolaan data pada aplikasi. Manual ini dijelaskan untuk memberikan penjelasan mengenai cara pembuatan *file excel* agar dapat diintegrasikan pada aplikasi *website* yang telah dibangun.

Gambar 3.3
Sistem Operasi Server Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat

Sistem Operasi (pada server jabarprov.go.id)	:	Linux Fedora/XP professional
DBMS	:	My SQL
Bahasa Pemrograman	:	PHP
Tools Desain	:	Microsoft Visio 2003, Power Designer, Adobe Photoshop, Corel Draw

(Sumber: Sub Humas KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008)

Gambar 3.3 di atas Sistem Operasi Server diperuntukan untuk, data-data dari hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dari TPS, PPK, KPU Kab/Kota, semua data tersebut dikumpulkan ke KPU Provinsi untuk dihitung, penghitungan menggunakan aplikasi *server database*, *server database* yang digunakan dalam penghitungan suara pada pemilihan Gubernur menggunakan *Linux Fedora* atau *XP professional*, *DBMS* menggunakan *MySQL*, bahasa

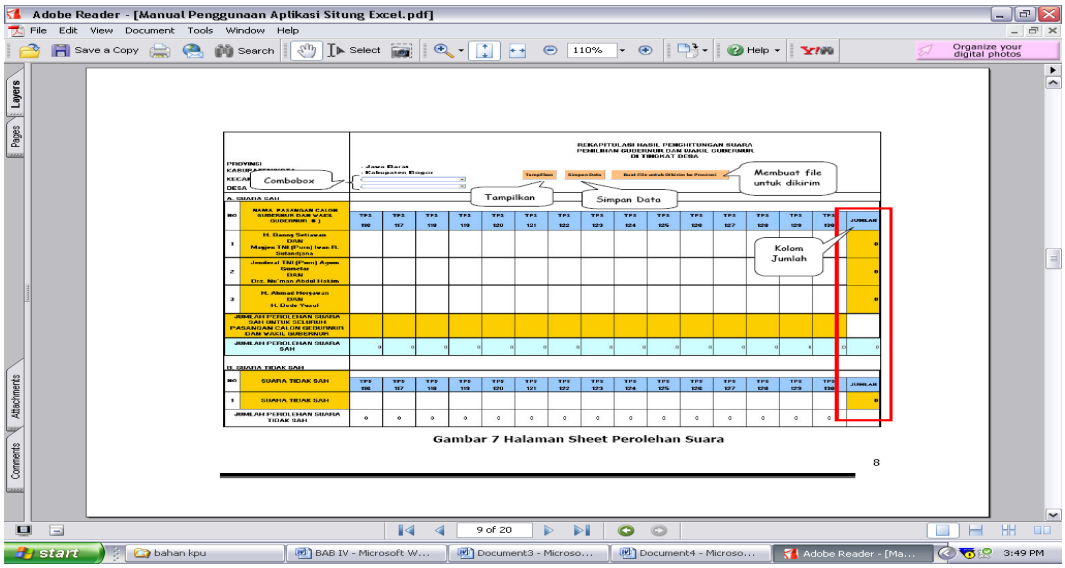
pemprogaman menggunakan *PHP*, dan *Tools Desain* menggunakan *Microsoft Visio* 2003, *Power Designer, Adobe Photoshop, Corel Draw*.

3.8.1 Tampilan Perolehan suara Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat

Fitur aplikasi SITUNG *excel*, memiliki dua macam fitur, fitur disini adalah, perolehan suara dan surat suara. Perolehan suara untuk mengelola perolehan suara *klik sheet* Perolehan Suara maka akan muncul halaman *sheet* perolehan suara. Untuk *input* data perolehan suara pilih Kecamatan dan Desa yang sesuai dengan data yang akan diinputkan pada *combobox* masing-masing. Kemudian isikan data perolehan suara sah calon 1 pada kolom isian TPS masing-masing. Lanjutkan pengisian data sampai dengan perolehan suara calon 3 dengan cara yang sama seperti pada nomor 2) sampai dengan 3).

Kemudian inputkan pula data jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan hasil perjumlahan perolehan suara (calon1 + calon2 + calon3) pada TPS masing-masing. Untuk perbandingan, lihatlah gambar 4.1 .Jumlah Perolehan Suara Sah yang berada tepat di bawahnya. Kolom jumlah pada sisi paling kanan_akan secara otomatis terisi. Selanjutnya, isilah data perolehan suara tidak sah pada TPS masing-masing. Kolom jumlah pada sisi paling kanan akan secara otomatis terisi. Klik Simpan Data untuk menyimpan data. Apabila muncul kotak dialog seperti gambar 8, klik OK untuk menyimpan data. Klik button Buat File Untuk Dikirim ke Provinsi untuk membuat file yang akan dikirimkan ke provinsi.

Gambar 3.4
Tampilan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur
Provinsi Jawa Barat



(Sumber: Sub Humas KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008)

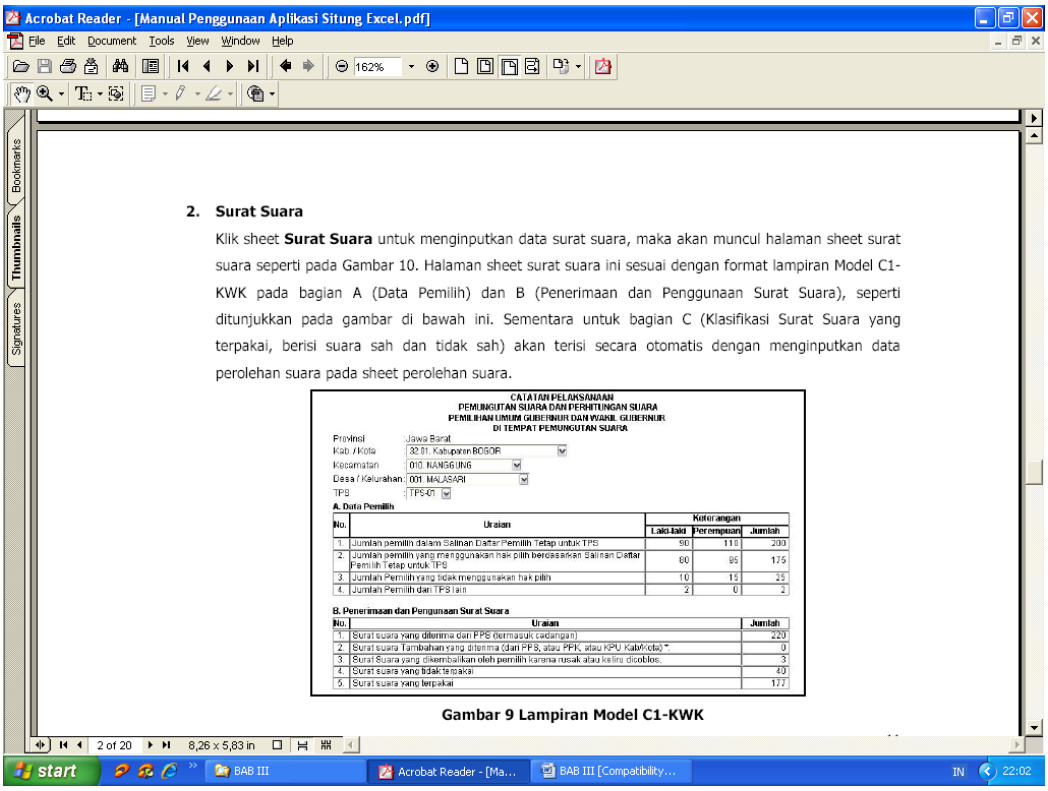
Untuk menampilkan data, pilih Kecamatan dan Desa yang sesuai dengan data yang akan ditampilkan pada *combobox* masing-masing, Kemudian *klik* Tampilkan Data. Sedangkan dalam *Mengedit* Data Pilih Kecamatan dan Desa yang sesuai dengan data yang akan ditampilkan pada *combobox* masing-masing. Kemudian klik Tampilkan Data. Edit data jumlah perolehan suara pada TPS, kemudian klik Simpan Data untuk menyimpan data. Apabila muncul kotak dialog seperti gambar 3.3 , klik OK untuk menyimpan data.

Gambar 3.5
Menyimpan Data Perolehan Suara Pemilihan Gubernur
Provinsi Jawa Barat



(Sumber: Sub Humas KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008)

Gambar 3.6
Surat Suara

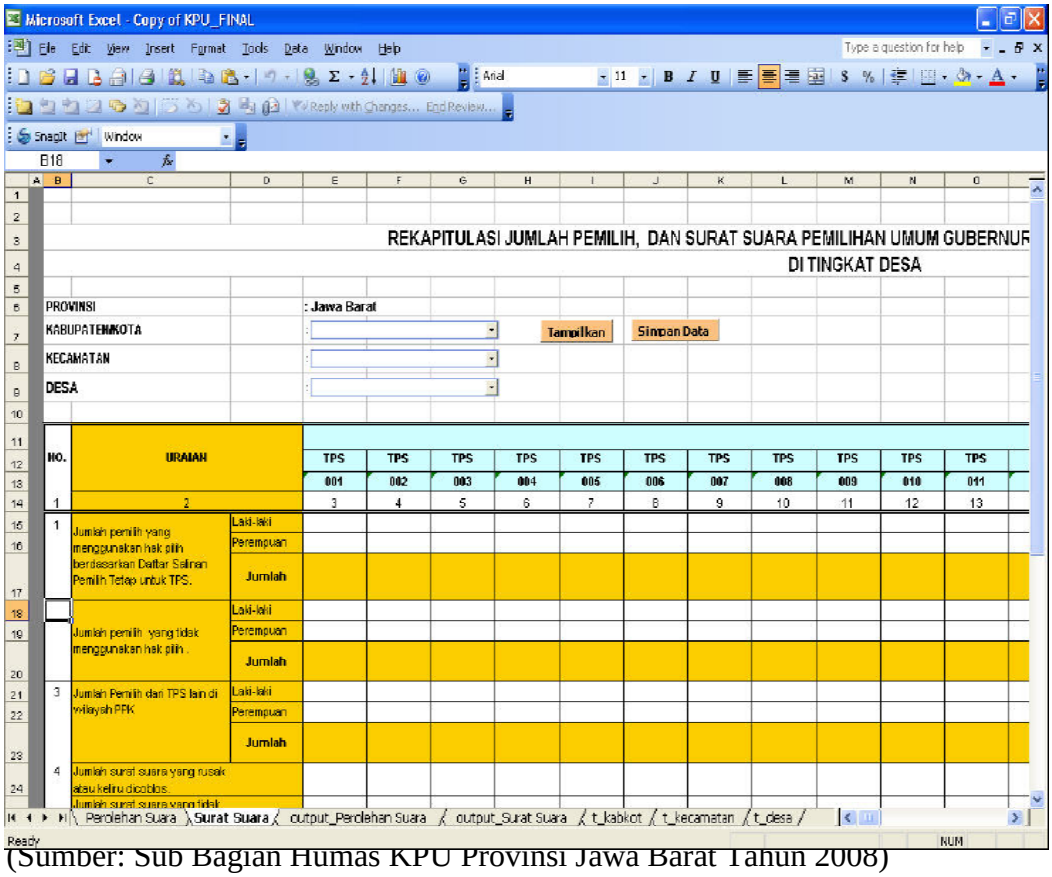


(Sumber: Sub Humas KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008)

Sedangkan Surat Suara *Klik sheet* Surat Suara untuk menginputkan data surat suara, maka akan muncul halaman *sheet* surat suara seperti pada Gambar 4.3 Halaman sheet surat suara ini sesuai dengan format lampiran Model C1-KWK

pada bagian A (Data Pemilih) dan B (Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara), seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sementara untuk bagian C (Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah) akan terisi secara otomatis dengan menginputkan data perolehan suara pada *sheet* perolehan suara.

Gambar 3.7
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Gubernur Provinsi Jawa Barat



(Sumber: Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008)

Bukalah *Window Explorer* Pada *folder* yang sama dengan *file* (*input.xls*), carilah *file excel* bernama kabupaten/kota masing-masing yang terbentuk secara

otomatis. Contoh : Kabupaten Bogor 20080404 134536.xls (nama kabupaten/ kota tanggal *file* terbentuk jam *file* terbentuk).

3.9 Gambaran Umum *Website* www.kpu.jabarprov.go.id

Website www.kpu.jabarprov.go.id merupakan situs resmi yang dimiliki oleh Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. *website* www.kpu.jabarprov.go.id. merupakan aspek penting yang menopang suksesnya pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008. KPU melalui Bagian Hukum dan Humas membuat desain system informasi pemilu. *Website* www.kpu.jabarprov.go.id di dominasi oleh warna orenge dengan memori 89,2 kbps tampilan menu *website* www.kpu.jabarprov.go.id Salah satu media yang cukup efektif untuk menyebarluaskan informasi.

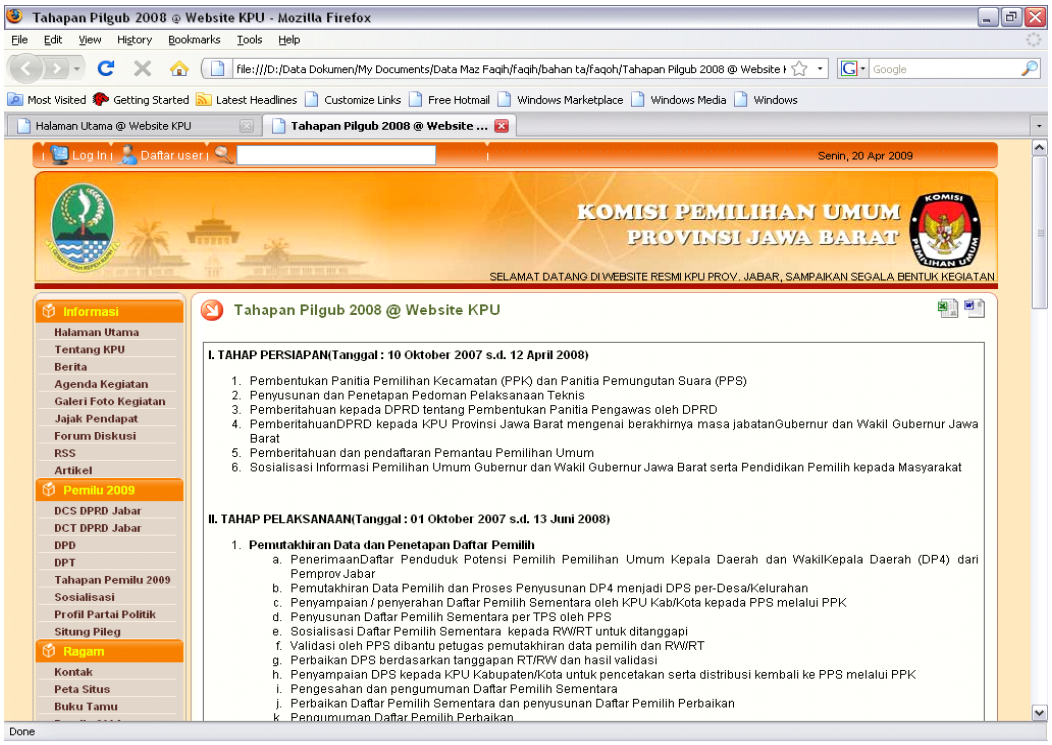
Gambar 3.8
Tampilan Halaman Utama KPU Provinsi Jawa Barat



(Sumber: *website* www.kpu.jabarprov.go.id)

Tampilan *website* diatas merupakan sarana untuk memaparkan berbagai informasi yang berkaitan dengan Pilgub seperti daftar Nama dan informasi yang Disajikan oleh *website* www.kpu.jabarprov.go.id yang dimiliki oleh KPU Provinsi Jawa Barat Sekilas Jawa Barat, Peta Jawa Barat. Jumlah Penduduk, Jumlah Pemilih, Regulasi, Agenda, Profil Kandidat, Opini, Berita Aktual (berisi tentang kegiatan KPU, Daftar Calon Legislatif, DPD, Presiden dan sebagainya).

Gambar 3.9
Tampilan Tahapan Pilgub



(Sumber:ww.kpu.jabarprov.go.id)

Tampilan isi *website* diatas mengenai penjelasan Tahapan Pilgub, diantaranya Tahap Pesiapan, Tahapan Pelaksanaan (Tanggal : 01 Oktober 2007 s.d. 13 Juni 2008) mencangkup Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih,

Pencalonan, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara Penetapan Hasil Pemilihan.dan Tahap Penyelesaian (Tanggal : 14 Juni 2008 s.d. 13 Agustus 2008).

Gambar 3.10
Tampilan Sosialisasi Maskot KPU Provinsi Jawa Barat



(Sumber: *www.kpu.jabarprov.go.id*)

Tampilan mascot sosialisasi didalam menu *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* memiliki makna filosofi yaitu menggambarkan seorang juru penerang, mensosialisaikan penyelenggaraan Pemilih Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang pemungutan suaranya pada hari minggu tanggal 13 April 2008.

1. Maskot Pilgub Jabar tahun 2008 berupa gambar (dua dimensi) berbentuk kotak suara yang diberi wajah tokoh wayang golek “Cepot” yang memakai Topi berbentuk atap Gedung sate dengan pase memperlihatkan kalender yang bertuliskan “ Minggu 13 April 2008”

2. Arti simbol-simbol tersebut adalah;

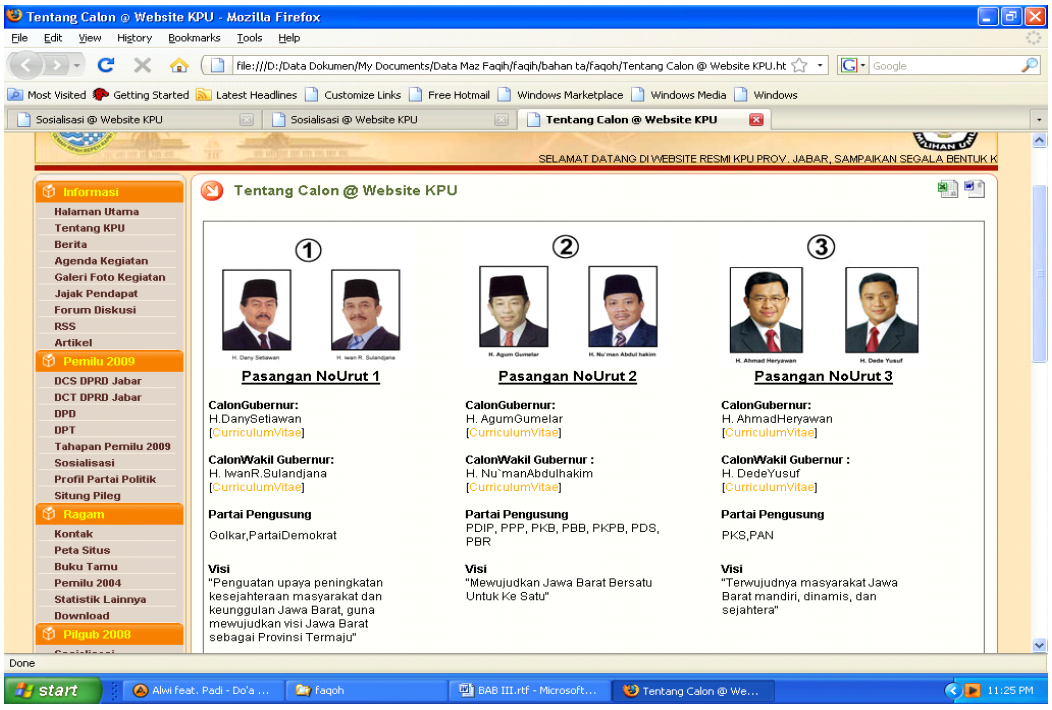
   a) Kotak suara, bermakna sarana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubenrur Jawa Barat

   b) Gedung Sate, bermakna tempat / kursi / jabatan yang dikompetisikan dalam Pemilihan Umum Gubenrur dan Wakil Gubenrur Jawa Barat

   c) Cepot, bermakana sebagai juru penerang penyelenggaraan kompetisi

   d) Kalender, memperlihatkan hari dan tanggal pemungutan dan wakil Gubernur Jawa Barat.

Gambar 3.11
Tampilan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat

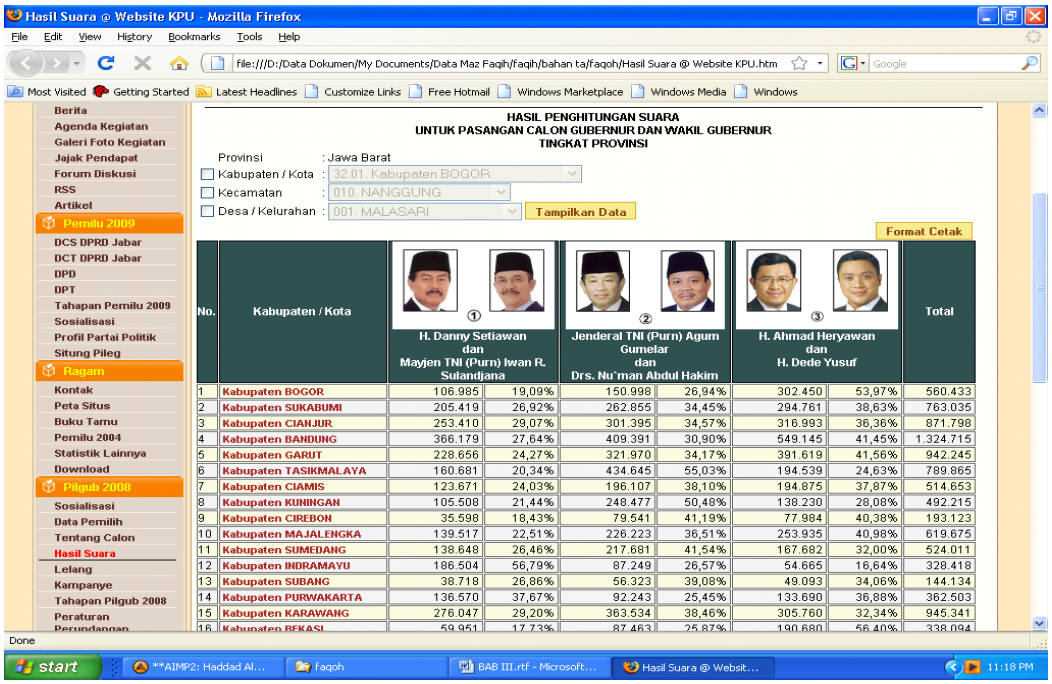


(Sumber:www.kpu.jabarprov.go.id)

Tampilan *website* di atas adalah *website* resmi yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Barat, *website* diatas mencangkup mengenai sosialisasi tentang calon

Gubernur Jawa Barat, mulai dari calon pasangan no urut pertama yaitu H.Dany Setiawan dan H. Iwan R Sulandjana, pasangan no urut kedua H. AgumGumelar dan H. Nu`manAbdulhakim, pasangan calon no urut ketiga adalah pasangan H. AhmadHeryawan dan H. DedeYusuf menjelaskan visi dan misi nya.

Gambar 3.12
Hasil Penghitungan Suara



(Sumber:www.kpu.jabarprov.go.id)

Tampilan isi *website* resmi KPU Provinsi Jawa Barat diatas hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi Jawa Barat.